

**REKAP DATA PENGADUAN KOMNAS HAM  
TAHUN 2016**

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **7.188 berkas**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	68	21	Kalimantan Selatan	50
2	Sumatera Utara	663	22	Kalimantan Tengah	59
3	Bengkulu	38	23	Kalimantan Timur	104
4	Jambi	85	24	Kalimantan Utara	11
5	Riau	219	25	Gorontalo	21
6	Sumatera Barat	391	26	Sulawesi Selatan	243
7	Sumatera Selatan	188	27	Sulawesi Tenggara	56
8	Lampung	99	28	Sulawesi Tengah	169
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	29	Sulawesi Utara	77
10	Kepulauan Riau	71	30	Sulawesi Barat	1
11	Banten	206	31	Sulawesi Selatan Barat	15
12	Jawa Barat	634	32	Maluku	231
13	DKI Jakarta	1759	33	Maluku Utara	12
14	Jawa Tengah	330	34	Papua	79
15	Jawa Timur	588	35	Papua Barat	20
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	115	36	Tanpa Alamat	238
17	Bali	74	37	Pakistan	1
18	Nusa Tenggara Barat	84	38	Swiss	1
19	Nusa Tenggara Timur	93	39	Tiongkok	1
20	Kalimantan Barat	72	40	Hongkong	1

## 2. Distribusi berkas pengaduan

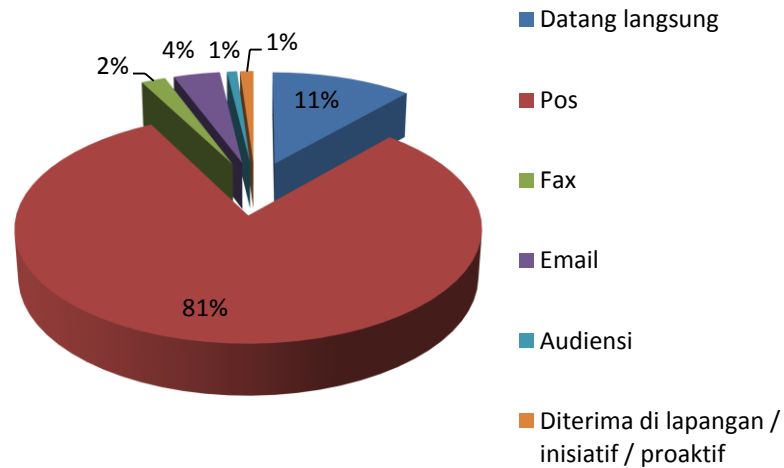
No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	3.981
2	Subkomisi mediasi	709
3	Tim 65	180
4	Tim KZ	3
5	Tim Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu	210
6	Tim	3
7	File	2.102
Jumlah		7.188

## 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	3.626
2	Tembusan	3.506
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan	56
Jumlah		7.188

## 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	823
2	Pos	5.813
3	Fax	143
4	Email	272
5	Audiensi	59
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	78
Jumlah		7.188



## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	230
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	11
3	Hak mengembangkan diri	82
4	Hak memperoleh keadilan	2697
5	Hak atas kebebasan pribadi	203
6	Hak atas rasa aman	628
7	Hak atas kesejahteraan	2748
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	80
9	Hak perempuan	36
10	Hak anak	29
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	25
12	Non HAM	419
Jumlah		7.188

## 5.1. Klasifikasi pengaduan

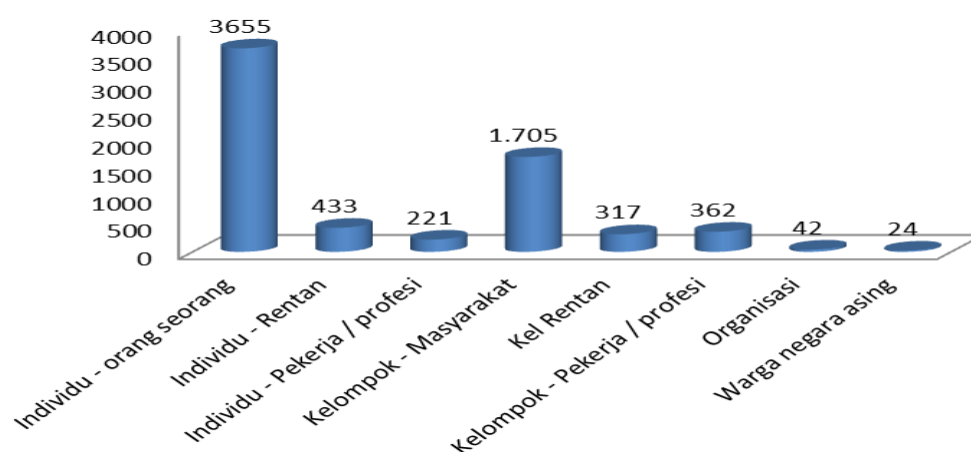
<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	<b>91</b>
Lingkungan hidup	<b>139</b>
	<b>230</b>
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	<b>10</b>
	<b>10</b>
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	<b>59</b>
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	<b>21</b>
	<b>80</b>
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	<b>2030</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di Kejaksaan	<b>153</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	<b>442</b>
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	<b>61</b>
	<b>2.686</b>
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	<b>8</b>
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	<b>97</b>
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	<b>15</b>
Berkumpul, berapat, dan berserikat	<b>27</b>
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	<b>3</b>
Menyampaikan pendapat di muka umum	<b>21</b>

Status kewarganegaraan	11
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	20
	202
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	3
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	121
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	159
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	102
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	1
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	142
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	97
	625
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	223
Hak atas kepemilikan tanah	1039
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	587
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	249
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	472
Hak atas kesehatan	131
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	34
	2.735

<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	<b>21</b>
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	<b>5</b>
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	<b>41</b>
	<b>67</b>
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	<b>5</b>
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	<b>1</b>
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	<b>7</b>
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	<b>16</b>
Hak atas kesetaraan dengan suami	<b>20</b>
	<b>49</b>
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	<b>4</b>
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	<b>18</b>
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	<b>16</b>
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	<b>1</b>
	<b>39</b>
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	<b>14</b>
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	<b>10</b>
	<b>24</b>

XII. Non HAM	Jumlah berkas
	441 <sup>1</sup>
Jumlah Seluruh	7.188

## 6. Klasifikasi korban



## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	619
2	Pemerintah daerah	931
3	Lembaga legislatif	4
4	Lembaga negara (Non kementerian)	122
5	Lembaga peradilan	436
6	Kepolisian	2.290
7	TNI	280
8	Kejaksaan	214
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	56
10	Pemerintah negara lain	15
11	Korporasi	1.030
12	BUMN / BUMD	359
13	Lembaga pelayanan kesehatan	28
14	Lembaga pendidikan	108
15	Organisasi	43

<sup>1</sup> Merupakan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi karena (i) berkas tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999; dan (ii) tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999.